

NOTA DINAS
NOMOR: 154 /IJ-IND.1/PR/II/2023

Kepada Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 9 Februari 2023

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

Dapat kami laporkan bahwa realisasi keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2022 mencapai mencapai Rp30.115.263.662,- atau sebesar 98,98% dari pagu anggaran Rp30.426.696.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%. 11 (sebelas) dari 15 (lima belas) indikator dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

Kami berharap di tahun 2023 dapat terus menyelenggarakan kegiatan dukungan manajemen pengawasan dengan lebih baik sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih lancar lagi.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Wawas Swathatafrijiah

Tembusan:
Kepala Biro Perencanaan



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2022.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2022 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Februari 2023

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Wawas Swathatafrijah

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
FEBRUARI 2023**

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2022.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2022 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Februari 2023
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Wawas Swathatafrijah

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah melalui Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2022. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Inspektur Jenderal serta kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan.

Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2022 antara lain:

- a. Realisasi Anggaran
 - Pagu DIPA : Rp30.426.696.000,-
 - Realisasi : Rp30.115.263.662,-
 - Persentase : 98,98%
 - Sisa Anggaran : Rp311.432.338,-
- b. Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal, diperoleh melalui kegiatan pengolahan Data dan Informasi terkait temuan material berdasarkan pengawasan eksternal. Cara pengukuran Indikator ini dengan Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian. Realisasi batas toleransi material di tahun 2023 adalah sebesar 0,033%;
- c. Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti. Kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum. Target yang ditetapkan sebesar 90%. Cara pengukuran Indikator ini adalah Persentase Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas. Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari-Desember 2022, Jumlah Pengaduan yang berkadar pengawasan sebanyak 2 kali

- pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Selama Tahun 2022, telah dilakukan penanganan pengaduan masyarakat sejumlah 208 aduan;
- d. Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi. Target yang ditetapkan sebesar 92%. Cara pengukuran Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Data rekomendasi yang digunakan adalah rekomendasi hasil pengawasan tahun sebelumnya (T-1). Realisasi Indikator ini yang dihitung selama tahun 2021 mencapai 86,52%, tidak mencapai target yang ditetapkan;
 - e. Indikator Nilai RB Area Penguatan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi Indikator ini melalui kegiatan Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Pelaksanaan PMPRB, Pelaksanaan penilaian Zona Integritas dalam rangka predikat WBK dan WBBM. Target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 72%. Realisasi dari penilaian yang telah dilakukan di tahun 2021 adalah 89,92% melebihi target yang ditetapkan;
 - f. Indikator Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) dengan target yang ditetapkan sebesar level 3. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peme taan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian. Cara pengukuran indikator ini adalah Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2021-2022 dengan Nota Dinas 716/IJ-IND.1/PW/IX/2022, hasil penjaminan kualitas dapat disimpulkan bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,063, Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) sebesar 2,85 dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 3,65;
 - g. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar Level 3. Kegiatan yang dilakukan adalah beberapa kegiatan yang termasuk dalam dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal. Realisasi di tahun 2022 Berdasarkan laporan Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan di Triwulan II-Triwulan III Tahun 2022. Hasil yang diperoleh Inspektorat Jenderal berada di Level 3;
 - h. Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Kegiatan penunjang indikator ini adalah Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja dan Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini

Sekretariat Inspektorat Jenderal. Realisasi yang diperoleh selama tahun 2022 sebesar 92,15% melebihi target yang ditetapkan;

- i. Indikator Efektivitas Regulasi Bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 76%. Cara pengukuran indikator ini dilihat dari perolehan hasil monev dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Realisasi diperoleh dari Survey yang telah dilaksanakan dengan hasil seluruhnya efektif sehingga mencapai 100%;
- j. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 78,4. Kegiatan yang mendukung Indikator ini adalah Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja dalam kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB pada setiap Instansi Pemerintah. Cara pengukuran indikator ini melalui Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal dari penilaian yang dilakukan di tahun 2021 adalah 77,8 dibawah target yang ditetapkan;
- k. Indikator Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal dengan target yang telah ditetapkan sebesar 72%. Kegiatan pendukung indikator ini adalah Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor, Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk, Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran. Cara pengukuran indikator ini adalah realisasi indikator ini dihitung dari hasil survei kepuasan pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dijalankan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Realisasi yang diperoleh ditahun 2022 adalah 91,4%;
- l. Indikator Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal, dengan target yang ditetapkan sebesar 92%. Cara pengukuran yang dilakukan melalui Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan hasil *Self Assessment*. Realisasi yang diperoleh di tahun 2022 sebesar 91,52% tidak memenuhi target yang telah ditetapkan;
- m. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 75. IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai IKPA Inspektorat Jenderal sebesar 87,12 melebihi dari target yang telah ditetapkan;

- n. Indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal dengan target yang telah ditetapkan sebesar 73. Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Realisasi yang diperoleh adalah 80,28 melebihi dari target yang telah ditetapkan;
- o. Indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan dengan target yang ditetapkan sebesar 65%. Cara pengukuran indikator ini adalah jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan dikali 100%. Realisasi di tahun 2022 adalah 78,95% melebihi target yang ditetapkan;
- p. Indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat dengan target yang ditetapkan sebesar 76%. Cara pengukuran indikator ini adalah membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal. Realisasi yang diperoleh di tahun 2022 adalah 97,2% melebihi dari target yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. Identifikasi Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder.....	9
D. Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	9
BAB II . PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Kinerja	10
B. Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.1.1 Analisis Capaian Organisasi	20
3.1.2 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
3.1.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian Kinerja	62
3.2 Realisasi Anggaran.....	63
3.3 Kendala dan Tindak Lanjut	70
BAB IV. PENUTUP	76
A. Keberhasilan.....	76
B. Permasalahan/Kendala.....	77
C. Upaya Dan Strategi Pemecahan.....	77

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	3
Bagan 2 Kriteria pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia	7
Bagan 3 Distribusi Pegawai PNS Sekretariat Inspektorat jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Bagan 4 Komposisi Gender Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	8
Bagan 5 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal	14
Bagan 6 Realisasi Capaian 5 Tahun terakhir Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal	22
Bagan 7 Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2019-2022	25
Bagan 8 rata-rata nilai PMPRB unit pusat tingkat Kementerian Perindustrian tahun 2022.	28
Bagan 9 Indeks Manajemen Risiko Kemenperin dari tahun ke tahun	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	4
Tabel 2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal	7
Tabel 3 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	11
Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020,2021 dan 2022	15
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2022.....	16
Tabel 6 Anggaran Kegiatan Inspektorat Jenderal.....	18
Tabel 7 Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian (Target berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024)	21
Tabel 8 Rekap Saldo Temuan Tindak Lanjut Hasil pengawasan	24
Tabel 9 Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan.....	24
Tabel 10 Perbandingan persentase Tindak Lanjut Kementerian	26
Tabel 11 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN).....	26
Tabel 12 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	27
Tabel 13 Ringkasan penilaian RB	29
Tabel 14 Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian.....	30
Tabel 15 Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	31
Tabel 16 Penilaian Mandiri IACM di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	36
Tabel 17 Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian	37
Tabel 18 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN).....	37
Tabel 19 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN).....	38
Tabel 20 Sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	39
Tabel 21 sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	41
Tabel 22 sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	42
Tabel 23 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	43
Tabel 24 Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	43
Tabel 25 Hasil Pengolahan dari Survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai... ..	45
Tabel 26 Sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.....	48
Tabel 27 Tabel Pelaksanaan diklat Inspektorat Jenderal Tahun 2022	52
Tabel 28 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	59
Tabel 29 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022	60
Tabel 30 Revisi DIPA selama tahun 2022 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan	64

Tabel 31 Realisasi Keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal	67
Tabel 32 Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja	67
Tabel 33 Kendala dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Sekretariat inspektorat Jenderal	71

BAB I . PENDAHULUAN

A. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan inspektorat jenderal;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

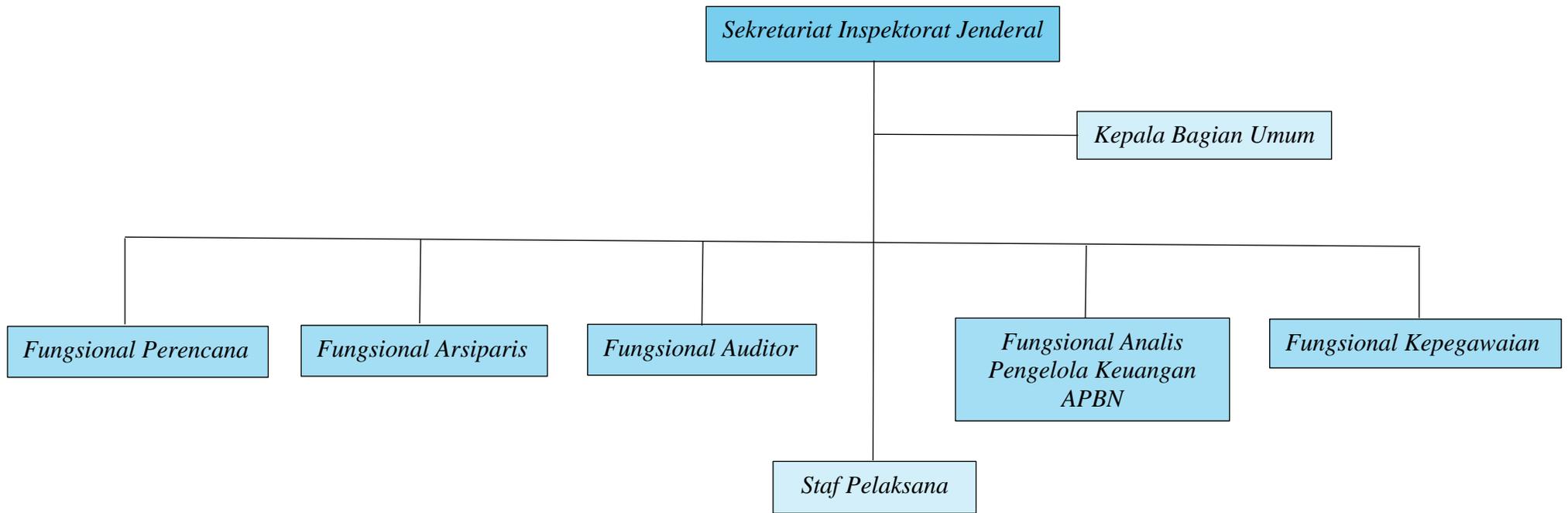
Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan pengawasan dalam mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* dan penjamin mutu kegiatan unit kerja;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;

3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk :

1. Menyusun program pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.



Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari lima Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, Barang Milik Negara, Tata Usaha, dan Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- b. Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit Sekretariat Inspektorat Jenderal pada awal tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp32.384.877.000,- namun kemudian dilakukan revisi menjadi Rp30.426.696.000,- dengan 3 (tiga) output (keluaran). Adapun alokasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		32.384.877.000	30.426.696.000
6036.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1 Produk		50.000.000
6036.BIA.001	Layanan Pengawasan Produk	1 Produk		50.000.000
051	Pengawasan Produksi dan Distribusi Produk Indonesia			50.000.000
A	Pengawasan Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah			50.000.000
6036.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24 Layanan	28.644.709.000	28.664.445.000
6036.EBA.957	Layanan Hukum	2 Dokumen	145.408.000	76.400.000
051	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		145.408.000	76.400.000
A	Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum		84.608.000	72.800.000
B	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		16.000.000	
C	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja		14.400.000	
D/C	Internalisasi Penerapan Kode Etik Auditor		14.400.000	3.600.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
E	Evaluasi Kelembagaan Internal dan Organisasi Inspektorat Jenderal		16.000.000	
6036.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	3 Laporan	61.920.000	149.840.000
051	Pelayanan Hubungan Masyarakat		61.920.000	149.840.000
A	Penerbitan Majalah Solusi		61.920.000	149.840.000
6036.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6 Dokumen	532.232.000	449.491.000
051	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi		532.232.000	449.491.000
A	Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian		19.000.000	14.637.000
B	Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		12.000.000	
C	Penilaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian		218.440.000	
D	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)		12.000.000	9.000.000
E	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian		256.992.000	146.265.000
F	Penilaian P3DN Semester I dan Fasilitasi Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Siswas P3DN		13.800.000	194.130.000
G	Penilaian P3DN Semester II			85.459.000
6036.EBA.962	Layanan Umum	1 Laporan	2.817.905.000	4.261.273.000
051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		2.817.905.000	4.261.273.000
A	Kebutuhan Umum di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal		2.717.905.000	3.113.988.000
B	Penataan Arsip dan Sistem Informasi		100.000.000	13.916.000
C	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan			1.133.369.000
6036.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan	25.107.244.000	23.727.441.000
001	Gaji dan Tunjangan		18.233.377.000	16.853.574.000
A	Pembayaran dan Gaji dan Tunjangan		18.233.377.000	16.853.574.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		6.873.867.000	6.873.867.000
A	Honorarium Operasional		2.298.176.000	2.016.038.000
B	Persediaan dan perlengkapan Kantor		266.300.000	299.100.000
C	Biaya Langganan dan Operasional Perkantoran		3.206.060.000	3.417.189.000
D	Koordinasi dan layanan Pimpinan		270.697.000	296.336.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		832.634.000	844.934.000
6036.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Unit	1.143.930.000	820.930.000
6036.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1.143.930.000	820.930.000
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1.143.930.000	820.930.000
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		1.143.930.000	820.930.000
6036.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	105 Orang	1.872.290.000	762.285.000
6036.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	105 Pegawai	1.872.290.000	762.285.000
A	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal		20.400.000	10.500.000
B	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		1.170.110.000	511.969.000
C	Pelatihan Di Kantor Sendiri		21.600.000	14.400.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
D	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		28.800.000	28.800.000
E	Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		25.200.000	
F	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Jenderal		10.800.000	
G	Fasilitasi Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor		7.200.000	
H	Penyusunan Peta Jabatan dan Info Jabatan Pegawai Inspektorat Jenderal		10.800.000	
I	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai Inspektorat Jenderal		7.200.000	3.600.000
J	Fasilitasi Bebas Masa Tugas menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		3.180.000	3.180.000
K	Peningkatan Kerjasama SDM Pegawai Inspektorat Jenderal (Team Building) Jawa Tengah		532.000.000	
L	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor		35.000.000	9.340.000
M	Forum Auditor dan Capacity Building			180.496.000
6036.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24 Dokumen	703.948.000	129.036.000
6036.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	48.000.000	14.400.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		48.000.000	14.400.000
A	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2023		8.000.000	
B	Penyusunan dan Revisi RKAKL Inspektorat Jenderal		16.000.000	14.400.000
C	Fasilitasi Reviu RKAKL		12.000.000	
D	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		12.000.000	
6036.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10 Dokumen	66.600.000	9.000.000
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		66.600.000	9.000.000
A	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal		30.600.000	9.000.000
B	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		12.000.000	
C	Reviu Renstra Inspektorat Jenderal		24.000.000	
6036.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	12 Bulan	57.400.000	27.600.000
051	Pengelolaan Keuangan		57.400.000	27.600.000
A	Pelayanan Perbendaharaan		30.000.000	27.600.000
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Keuangan dan BMN		8.600.000	
C	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN		8.000.000	
D	Penyusunan RK BMN		3.600.000	
E	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		7.200.000	
6036.EBD.965	Layanan Audit Internal	1 Dokumen	531.948.000	78.036.000
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		531.948.000	78.036.000
A	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		74.736.000	50.736.000
B	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		24.000.000	22.500.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
C	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan		433.212.000	
D	Koordinasi Penilaian SAKIP Unit Eselon I Kementerian Perindustrian			4.800.000

Sumber: POK Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 (POK Awal dan POK revisi 14)

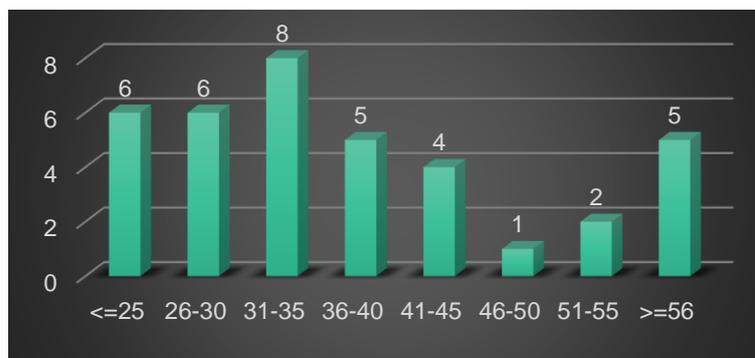
Dalam pelaksanaan tugas, komposisi Sumber Daya Manusia yang berada di Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon I	1
2	Eselon II	1
3	Eselon III	1
4	Fungsional Lainnya	7
5	Staf Pelaksana	27
Total		37

Sumber: Data kepegawaian Sekretariat Itjen

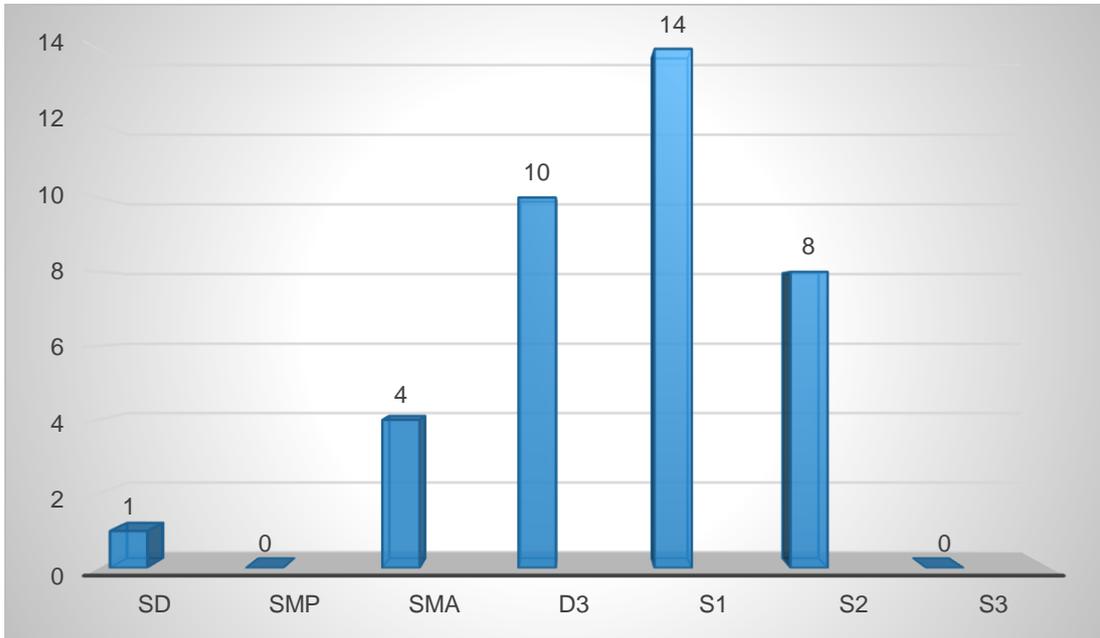
Adapun distribusi pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia adalah sebagai berikut:



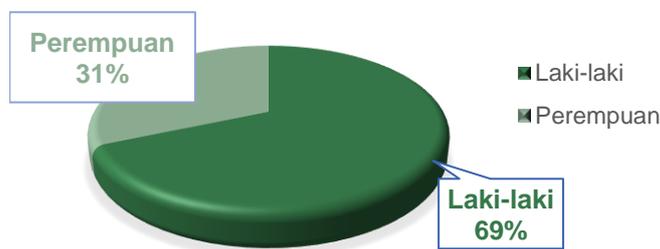
Bagan 2 Kriteria pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia

Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari golongan I sejumlah 1 orang, golongan II sejumlah 12 orang, golongan III sejumlah 15 orang dan golongan IV sejumlah 9 orang.

Total pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian ditambah dengan pegawai Non PNS berjumlah 50 Pegawai, yang terdiri dari 33 orang laki-laki dan 17 orang perempuan.



Bagan 3 Distribusi Pegawai PNS Sekretariat Inspektorat jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Bagan 4 Komposisi Gender Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022

B. Rumusan Permasalahan

Dengan kondisi yang dihadapi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2022, maka hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai?
- 2) Target realisasi anggaran mencapai target?
- 3) Bagaimana kesesuaian pencapaian kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah dan RPJMN?

C. Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder

Untuk menjawab permasalahan yang sudah dinyatakan di atas, akan digunakan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Aplikasi SPAN dan emon untuk membandingkan data realisasi anggaran;
2. Aplikasi SMART DJA dan emonev Bappenas untuk melihat capaian output masing-masing kegiatan;
3. Notulensi rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin; dan
4. Laporan evaluasi yang disusun rutin yang disusun setiap bulan.

D. Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer

Adapun data primer yang akan digunakan bersumber dari hasil wawancara langsung dengan penanggungjawab kegiatan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit pendukung penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian mempunyai visi “*Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*”.

Adapun misi Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”

Perencanaan strategik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Mendukung tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien melalui pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal	Tj 1.1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3	3	3	3*	3*
			Tj 1.2	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi auditor	Nilai	BB	BB	A	BB*	BB*
			Tj 1.3	Terselenggaranya dukungan manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal	Dukungan kesekretariatan pengawasan Inspektorat Jenderal	Layanan	12 bulan				

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024

* Berdasarkan hasil rapim Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Pada tahun 2022, sasaran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal disajikan sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. *Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal;
 - b. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti;
 - c. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.
2. *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai RB Area Penguatan Pengawasan;
 - b. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU.

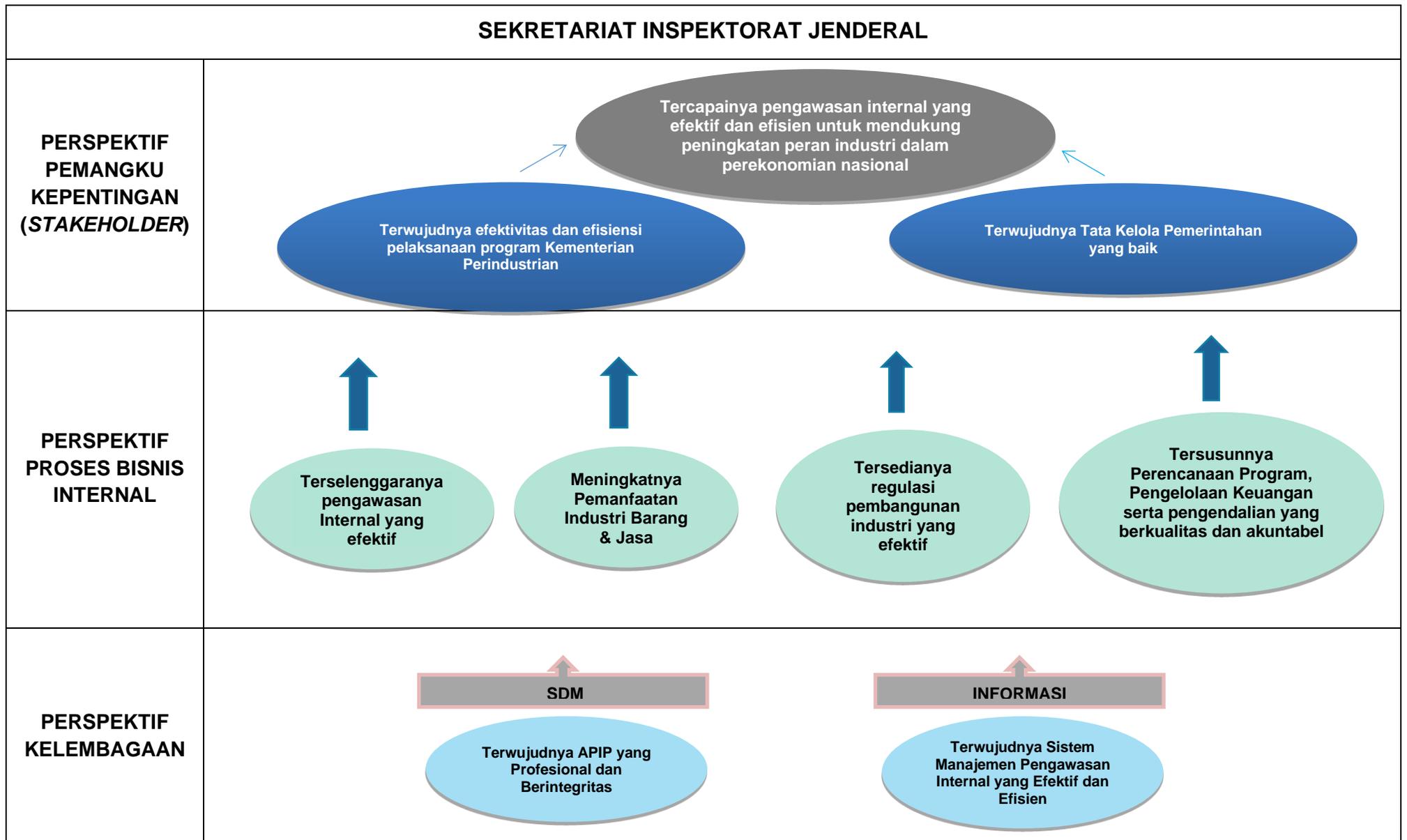
Perspektif Proses Bisnis Internal

3. *Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Capaian IACM Inpektorat Jenderal *)IKU
4. *Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa* dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU
5. *Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif* dengan indikator sebagai berikut:
 - Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal
6. *Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel* dengan indikator sebagai berikut:
 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal.

Perspektif Kelembagaan

7. *Terwujudnya sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien, dengan indikator sebagai berikut:*
 - a. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal;
 - b. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen;
 - c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

8. *Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas, dengan indikator sebagai berikut:*
 - a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
 - b. *Sharing Knowledge* keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
 - c. Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat.



Bagan 5 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

B. Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2022 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022:

Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020,2021 dan 2022

Perubahan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Dari sisi Perspektif	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan
Dari sisi Sasaran Strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 1 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 16 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 18 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 15 indikator kinerja

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2022, Sekretariat Inspektorat Jenderal membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal ke dalam indikator kinerja yang rinci sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan.

Perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1.	Terwujudnya dan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,3%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	72%
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Capaian IACM Inpektorat Jenderal *)IKU	IACM Level 3
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	80%
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	76%
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Berkualitas dan Akuntabel		
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN			
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	72%
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	92%
		Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	75
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73
		Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%
		Persentase APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Untuk mewujudkan target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal telah disusun kegiatan, yaitu:

1. Pengawasan dan Pengendalian Produk dengan anggaran Rp50.000.000,-
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan anggaran Rp28.664.445.000,-;
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran Rp820.930.000,-;
4. Layanan Manajemen SDM Internal dengan anggaran Rp762.285.000,-;
5. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan anggaran Rp129.036.000,-

Adapun target kinerja untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Anggaran Kegiatan Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Stakeholders Perspective				
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	1.30%	1,205,869,000.00
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	149,840,000.00
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	50,736,000.00
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	72%	169,902,000.00
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	-
Internal Process Perspective				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	-
		Capaian IACM Itjen	Level 3	225,836,000.00
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	78%	-
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	1,100,519,000.00
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	76%	72,800,000.00
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.4	13,800,000.00
Learn & Growth Perspective				
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	72%	26,869,025,000.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	92%	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	75	42,000,000.00
8	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	-
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	65%	14,400,000.00
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	76%	511,969,000.00

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai fasilitasi/ layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2022.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Analisis Capaian Organisasi

Secara umum Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen-dokumen tersebut di atas yang akan dijabarkan kemudian.

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut:

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Sasaran 1: Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian (Target berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,4%	0,033%	1,3%	0,033%	197,46 %
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	100%	90%	100%	111,11 %
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan)	91,5%	93,76%	92%	86,52%	94,04%

a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dan pemutakhiran data dalam rangka memenuhi Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal. Koordinasi yang dilakukan berupa koordinasi dengan unit kerja pusat dan vertikal dalam rangka Penyelesaian tindak lanjut atas saldo temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dilaksanakan secara rutin, Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

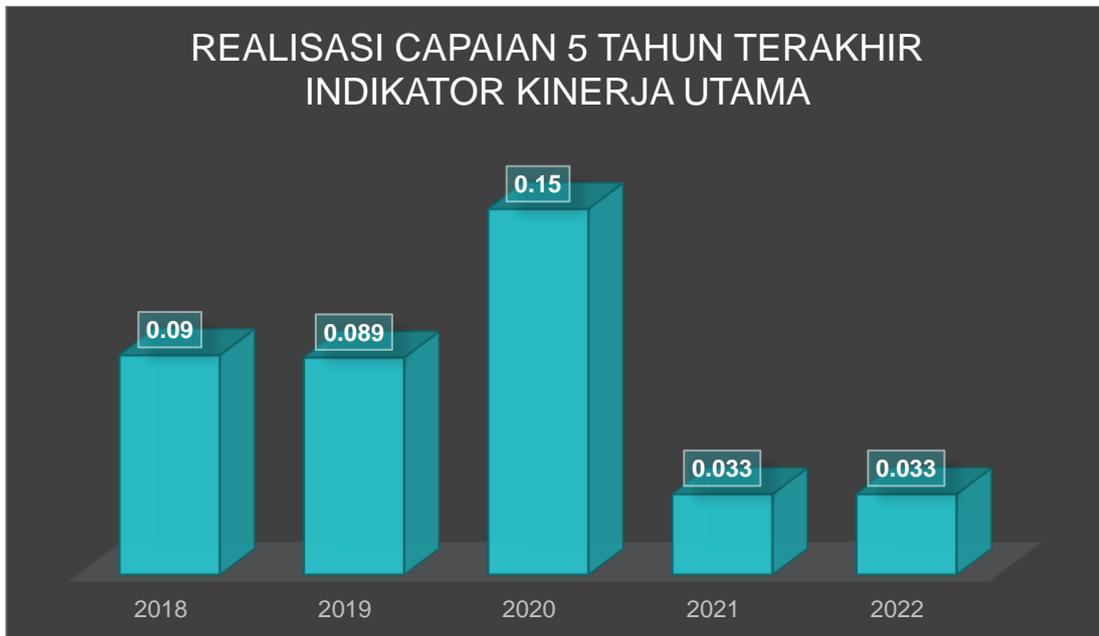
Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun sebelumnya. BPK telah Me-release hasil pemeriksaan pada tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana Laporan Nomor 26.b/LHP/XV/05/2022 sebagai berikut:

Pada tahun 2022 ini, realisasi jumlah temuan BPK atas laporan keuangan yaitu 0,033% yang dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{temuan BPK}}{\text{realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2021}} = \frac{\text{Rp 911.451.935,12}}{\text{Rp 2.754.170.682.332}} \times 100\% = 0,033\%$$

maka, realisasi batas toleransi temuan adalah 0,033% dan telah mencapai target. Kegiatan koordinasi ini menghasilkan 2 (dua) laporan, yaitu Laporan Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan BPK Semester I dan II. Keberhasilan tercapainya target indikator ini tidak lepas dari pelaporan keuangan Kementerian Perindustrian yang dilakukan secara akuntabel, efektif dan efisien sehingga temuan BPK yang bernilai uang tidak melebihi dari batas toleransi temuan yang ditetapkan.



Bagan 6 Realisasi Capaian 5 Tahun terakhir Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal

b. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal bertugas untuk menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang pedoman penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Inspektur Jenderal No. 127/IJ-IND/PER/10/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan Pengaduan Masyarakat.

- Periode 1 Januari s/d 30 April 2022, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 108 (Seratus delapan) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang terdiri dari 106 (seratus enam) kali merupakan pengaduan tidak berkadar pengawasan dan 2 (dua) kali berkadar pengawasan terkait masalah kepegawaian. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 Mei s/d 30 Agustus 2022, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 48 (Empat Puluh Delapan) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara

online yang seluruh nya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;

- Periode 1 September s/d 31 Desember 2022, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 52 (Lima Puluh Dua) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruh nya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022, realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 111,11%. Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk hanya sedikit dan langsung ditindaklanjuti untuk diselesaikan. Hal itu berarti kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik.

c. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker

Kegiatan pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker menghasilkan 4 (empat) laporan. Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker dibagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1).

Tabel 8 Rekap Saldo Temuan Tindak Lanjut Hasil pengawasan

No	Satker	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Saldo Temuan	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi
1	Pusat	246	Rp 116.393.112,00	159	87	215	60
2	Balai Besar	119	Rp 6.600.000,00	119	0	146	0
3	Baristand	91	Rp -	89	2	113	2
4	Balai Diklat	20	Rp 46.006.400,00	69	5	27	1
5	Sekolah	74	Rp 11.736.565,00	74	5	115	1
6	Dekonsentrasi	96	Rp 2.350.000,00	0	22	86	4
TOTAL		646	Rp 183.086.087,00	367	121	702	68

Sumber: tim kerja Pemantauan Tindak Lanjut

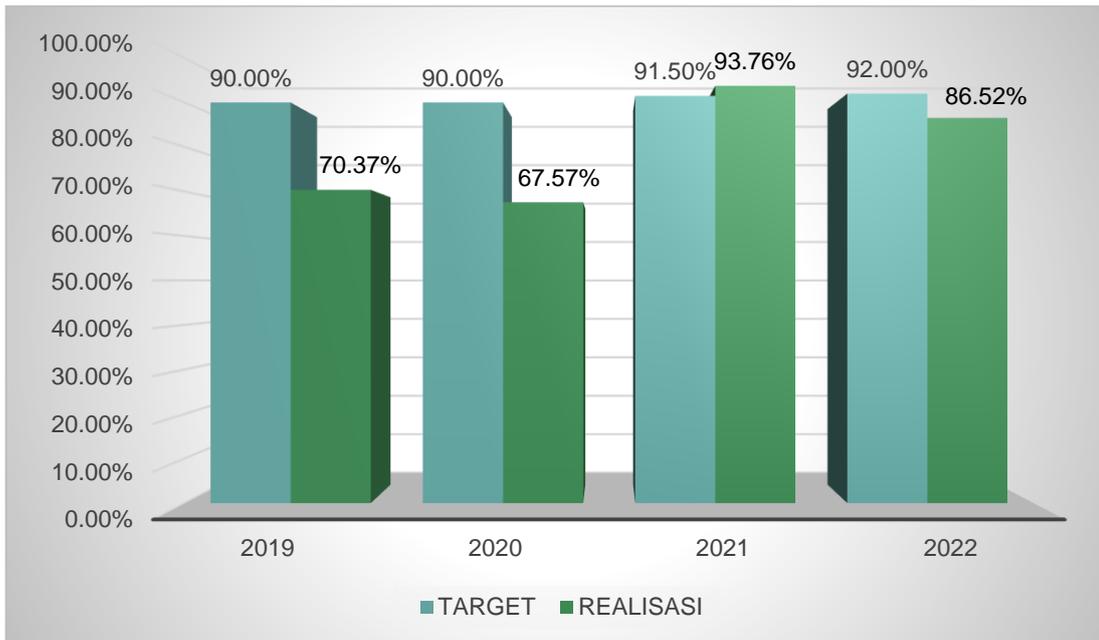
Di tahun 2021, total rekomendasi dari seluruh satker terdapat 890 rekomendasi. Rekomendasi yang telah sesuai sebanyak 702 dan rekomendasi yang belum sesuai 68 rekomendasi. Sehingga total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker sebanyak 510. Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2021 diperoleh realisasi 86,52% atau capaian indikator sebesar 94,04%.

Hasil rekomendasi tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan tahun 2021 ini menunjukkan bahwa indikator ini tidak dapat melampaui target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022. Dengan demikian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mengalami fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 9 Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan

Perbandingan Capaian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	88,77%	70,37%	67,57%	93,76%	86,52%

Sumber: tim kerja Pemantauan Tindak Lanjut diolah



Bagan 7 Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2019-2022

Diharapkan tahun 2023, realisasi Indikator ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Pada tahun 2023, target capaian penyelesaian tindak lanjut dikoreksi menjadi 92% dan 92,2% pada tahun 2024. Sekretariat Inspektorat Jenderal akan menyusun strategi antara lain dengan melakukan temu teknis secara intensif serta rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut triwulanan. Diharapkan dengan strategi tersebut target kinerja dapat dipenuhi pada akhir tahun 2023.

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan persentase Tindak Lanjut Kementerian

Tahun	Kementerian/Lembaga									
	Perhubungan		Perindustrian		Pertanian		PDT		KKP	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2018	87%	94,07%	88%	88,77%	80%	66,67%	90%	60%	83,5%	76,91%
2019	90%	79,26%	88%	70,37%	90%	80,76%	70%	75%	84%	87,45%
2020	85%	87,36%	91%	67,57%	75%	78,9%	53%	61,52%	60%	83,77%
2021	80%	47,37%	91,5%	93,76%	80%	86,27%	30%	59,71%	65%	89,83%
2022	Belum ada data	Belum ada data	92%	86,52%	Belum ada data					

Sumber: Data dari berbagai sumber

Perbandingan indikator “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 11 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2020		2021		2022	
	Target	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	80%	62%	91,5%	93,76%	92%	86,52%
B POM	90%	92,98%	62%	69,25%	Belum ada data	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	60%	83,77%	65%	89,83%	Belum ada data	Belum ada data

Sumber: Data dari berbagai sumber

Dari tabel di atas terlihat bahwa target “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker” yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal berada pada level moderat jika dibandingkan dengan target Kementerian/Lembaga lain untuk indikator serupa.

Keberhasilan kegiatan koordinasi pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker ini dalam memenuhi target yang ditetapkan tidak lepas dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti yang terlaksana dengan baik sehingga

dalam penyusunan laporan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan yang dihasilkan di tahun 2022 adalah Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan I-IV 2022.

Sasaran 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yang ditetapkan pada tahun 2022, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 12 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	72%	89,92%	124,88%
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU	Level 3	Level 2 (2,85)	95%

a. Nilai RB Area Penguatan Pengawasan

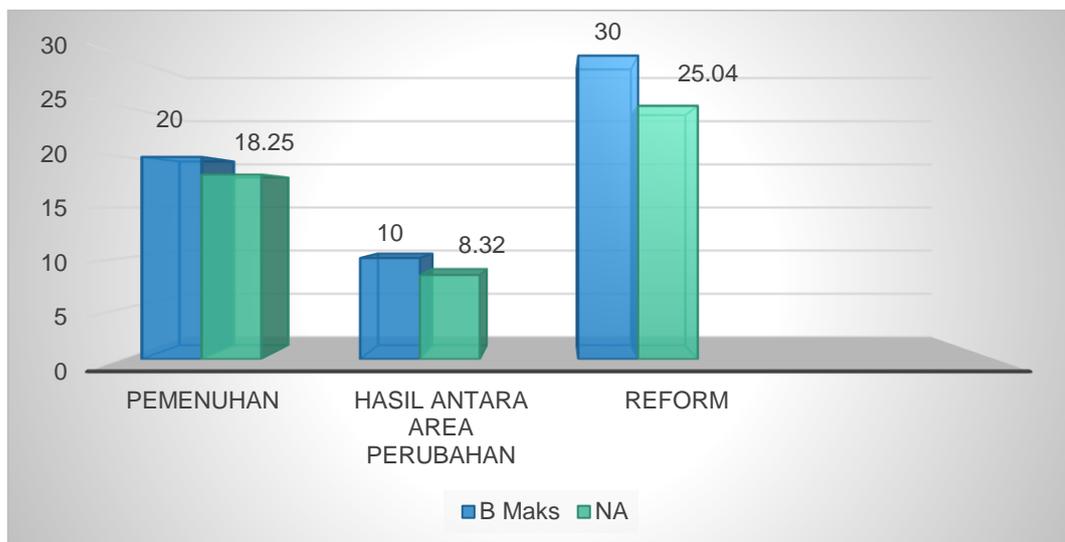
Indikator ini dapat dilihat dari hasil konsensus antara seluruh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit Pusat (Kementerian). Kementerian Perindustrian telah melaksanakan PMPRB sejak bulan April sampai dengan Juni 2022 dimana panel penilaian dilakukan sebanyak 3 kali. Panel penilaian PMPRB dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu Panel I yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei s.d. 20 Mei 2022, Panel II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei s.d. 3 Juni 2022, dan Panel III yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit Pusat (Tingkat Kementerian) sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022, dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk menjamin kualitas hasil penilaian mandiri (*self assessment*), maka pelaksanaan penilaian mandiri didampingi oleh Tim *Quality Assurance* yaitu Auditor Inspektorat Jenderal. Nilai akhir yang telah disepakati tersebut menjadi dasar untuk penyampaian hasil PMPRB Kementerian Perindustrian

kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui tautan bit.ly/SubmitPMPRB2022.

Nilai Akhir PMPRB Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Nilai PMPRB Unit Kerja Eselon I rata-rata sebesar 33,49 dari bobot sebesar 36,30 dengan capaian 92,26%;
2. Nilai PMPRB Unit Pusat (Kementerian) sebesar 85,84 dari bobot sebesar 100,00 dengan capaian 85,84%;
3. Berdasarkan hasil akhir PMPRB maka diperoleh Index RB Kementerian Perindustrian Tahun 2021 *unevaluated* sebesar **85,60** dengan kategori **A** atau predikat **Sangat Baik**.

Berikut ini adalah rata-rata nilai PMPRB unit pusat tingkat Kementerian tahun 2021:



Bagan 8 rata-rata nilai PMPRB unit pusat tingkat Kementerian Perindustrian tahun 2022

Keterangan:

- B Maks** : Bobot Maksimal
NA : Nilai Akhir

Sedangkan Indikator Nilai RB area penguatan pengawasan dihitung dari Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi atau dengan rumus Jumlah Indeks RB/Jumlah nilai maksimum dalam penilaian RB.

Berikut ini adalah tabel ringkasan penilaian RB :

Tabel 13 Ringkasan penilaian RB

Penilaian	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Maksimum Penilaian RB berdasarkan Ketetapan MenPAN RB
Pemenuhan (Penguatan Pengawasan)	2,39	2,5
Reform (Penguatan pengawasan)	3,23	3,75
Total	5,62	6,25

Sumber: Data bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Nilai Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan dapat dilihat pada ringkasan penilaian RB penguatan pengawasan yang terdiri dari pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,39 dan 3,23 adalah 5,62. Sedangkan jumlah bobot maksimal pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,5 dan 3,75 adalah 6,25. Sehingga Nilai penguatan pengawasan yang didapat dari perbandingan pemenuhan dan reform dengan bobot maksimal adalah sebesar 89,92%. Capaian dari Indikator ini adalah 124,88%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan diperoleh dari hasil kemajuan pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perindustrian dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

b. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan *Quality Assurance* oleh APIP.

Penilaian maturitas SPIP tahun 2022 ini telah dilaksanakan pada September 2022. Penilaian maturitas SPIP tahun 2022 tidak dilakukan per unit kerja, namun dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian. Hasil penilaian mandiri

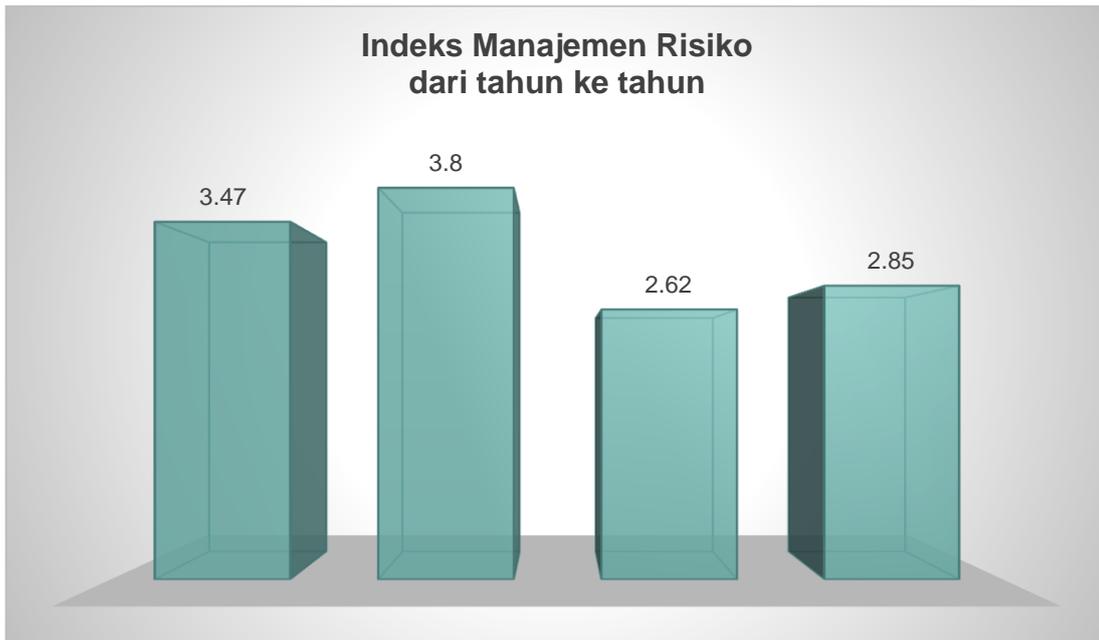
maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2021/2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**terdefinisi**” atau tingkat **3 (tiga)** dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,063. Hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		
2.	Struktur dan Proses		
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,063
	- MRI	2	2,85
	- IEPK	3	3,65

Sumber: Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2021-2022

Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, nilai Indeks Manajemen Risiko yang diperoleh adalah 2,85. Realisasi ini berada pada level 2 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan koordinasi penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini didahului dengan diadakannya Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Manajemen Risiko (MRI) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Sekjen) selaku koordinator penilaian mandiri SPIP Kementerian Perindustrian serta dengan BPKP untuk teknis pelaksanaan penilaian SPIP di tahun berikutnya.



Bagan 9 Indeks Manajemen Risiko Kemenperin dari tahun ke tahun

Selanjutnya perlu dilakukan pendampingan ke tiap satuan kerja dalam rangka manajemen risiko di unit tersebut.

PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL

Sasaran 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif

Indikator dari sasaran terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Capaian IACM Inspektorat Jenderal *) IKU	Level 3	Level 3	100%

a. Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU

Indikator Kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan rencana kegiatan yang

dilaksanakan oleh seluruh pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator ini telah digunakan pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

Uraian rencana tindak yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai level 3 penuh adalah sebagai berikut:

a. Elemen 1: Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM mendapatkan skor 0,540 atau sudah mencapai Level 3, hal ini berarti APIP telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten berdasarkan analisis dan uraian jabatan, proses rekrutmen dilakukan dengan benar, terbuka, adil dan transparan, dan pengembangan SDM telah menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, namun masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*) sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mekanisme/kriteria pemberian penghargaan individu dan tim;
- 2) Memberikan penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK Tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan individu;
- 3) Menyusun peta kompetensi SDM berdasarkan kerangka kompetensi dan memuat analisis Gap kompetensi.

b. Elemen 2: Praktik profesional

Praktik Profesional mendapatkan skor 0,540 atau sudah mencapai Level 3, hal ini berarti

1) Penyusunan PKPT telah:

- Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi K/L/D serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya;

- Mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau *audit Universe* (antara lain: urusan, unit kerja, program, kegiatan, fungsi yang dapat diawasi);
 - Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;
 - Mempertimbangkan masukan dari manajemen K/L/D dan Stakeholders lainnya;
 - Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan Sumber Daya (SDM, Waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi;
 - Menetapkan Jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya;
 - Mendapatkan persetujuan pimpinan organisasi K/L/D.
- 2) Selain itu telah dilakukan pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar, meliputi: perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan Tindak Lanjut.
- 3) Upaya peningkatan Area of Improvement adalah sebagai berikut:
- Masih dapat melaksanakan penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri dan atau oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, kode etik dan standar audit;
 - Pelaksanaan penilaian ekstern secara berkala dan sesuai dengan standar;
 - Melaporkan hasil QAIP (Quality Assurance and Improvement Program), yang mencakup:
 - Ruang lingkup dan frekuensi, baik atas penilaian intern dan ekstern;
 - Kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan;
 - Kesimpulan penilai atau tim penilai;

- Rencana dan tindak perbaikan;
 - Melaksanakan dan mendokumentasikan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) dengan mengembangkan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti hasil QAIP.
- c. Elemen 3: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mendapat skor 0,180 atau telah mencapai level 3, hal ini berarti

- 1) Renja dan RKA telah dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja APIP dan penyusunan PKPT, serta menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Sumber Daya dalam mencapai tujuan pengawasan;
- 2) Sistem Pelaksanaan anggaran APIP telah selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional K/L beserta pelaporannya, telah dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien dan ekonomis, dan telah dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan;
- 3) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawasan di lingkungan APIP (Inspektur Jenderal, Inspektur dsb) telah selaras dengan Perjanjian Kinerja Pimpinan APIP, Perjanjian Kinerja/SKP telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan APIP, dan Sistem Pengukuran Kinerja APIP telah digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi APIP;
- 4) Laporan Akuntabilitas pada manajemen K/L telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan, dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya)

Masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*) sebagai berikut:

- Membangun sistem pengukuran kinerja APIP yang digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT);
- Melakukan pemantauan terhadap sistem tersebut secara berkala.

d. Elemen 4: Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi mendapatkan skor 0,180 atau sudah mencapai Level 3, hal ini berarti struktur organisasi APIP telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi APIP dan telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan, namun masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*), sebagai berikut:

- 1) Melakukan penjadwalan pertemuan antara pimpinan APIP dengan pimpinan K/L secara berkala;
- 2) Menggunakan/memanfaatkan hasil dari survey kepuasan pelanggan, forum, apel pagi, rapat berkala, dan sebagainya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan.

e. Elemen 5: Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola mendapatkan Skor 0,360 atau sudah mencapai Level 3, hal ini berarti alokasi anggaran pengawasan telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern, APIP dalam melakukan penugasan pengawasan dapat mengakses informasi organisasi, asset, dan SDM K/L secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi, dan pimpinan APIP menyampaikan laporan kegiatan APIP sesuai standar manajemen K/L. Masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*), sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi alokasi anggaran pengawasan secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern dan ditetapkan melalui mekanisme yang transparan sesuai peraturan yang berlaku;
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan kegiatan pelaporan oleh pimpinan APIP.

f. Elemen 6: Peran dan Layanan

Peran dan Layanan mendapatkan Skor 1,200 atau telah mencapai Level 3, hal ini berarti APIP telah merencanakan dan melaksanakan Audit Ketaatan dan Audit Kinerja yang telah direviu dan disupervisi secara berjenjang, telah memberikan jasa konsultasi sesuai kewenangannya dalam Internal Audit Charter, serta

melaporkan hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan hasil jasa konsultasi kepada manajemen K/L. Masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*) sebagai berikut:

- 1) Menyusun pedoman pelaksanaan assurance atas GRC (Governance, Risk and Compliance) yang memuat persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Assurance;
- 2) Melaksanakan Assurance atas GRC dan melaporkan hasilnya kepada manajemen K/L;
- 3) Memastikan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau Tindakan yang diambil sebagai hasil dari saran yang diberikan melalui jasa konsultasi.

Berdasarkan penilaian mandiri IACM di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2021 diperoleh skor sebesar 3,00 atau berada pada level 3 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Penilaian Mandiri IACM di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No	Elemen/Topik	Skor	Simpulan Level
1	Dukungan Pengawasan (Enabler)		
	a. Pengelolaan SDM	0,540	3
	b. Praktik Profesional	0,540	3
	c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,180	3
	d. Budaya dan Hubungan Organisasi	0,180	3
	e. Struktur Tata Kelola	0,360	3
2	Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)		
	a. Peran dan Layanan	1,200	3

Sumber: Laporan PMPRB Tahun 2022

Hal ini berarti Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian termasuk dalam kategori **Delivered**, dimana APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (Assurance dan Consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional.

Tabel 17 Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Capaian IACM Inspektorat Jenderal *) IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 (3,05)	Level 3 (3,10)

*Hasil Rapim Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Perbandingan indikator “Capaian IACM Inspektorat Jenderal” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Kementerian ESDM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data	Belum ada data

Dari dokumen RPJMN sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menggunakan level kapabilitas APIP sebagai indikator kinerja seperti Kementerian Perindustrian.

Keberhasilan pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih memerlukan upaya untuk menyempurnakan rencana tindak lanjut yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai level 3 penuh yang dilihat dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional dan struktur tata kelola.

Sasaran 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa

Indikator dari sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	80%	92,15%	115,18%

Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Sekretariat Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selama tahun 2022, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{RAP3DN}{TOTALP3DN} = \frac{Rp\ 6.638.104.248}{Rp\ 7.203.464.000} \times 100\% = 92,15\%$$

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun sebagai berikut:

521211: Belanja Bahan

521219: Belanja Barang Operasional Lainnya

521811: Belanja Barang Persediaan Konsumsi

522192: Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19

524114: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

521111: Belanja Keperluan Perkantoran

521131: Belanja Barang Operasional-Penanganan pandemi Covid-19

522141: Belanja Sewa

524119: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota

522191: Belanja Jasa Lainnya

521241: Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19

532111: Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dari perhitungan diatas disimpulkan bahwa realisasi dari indikator ini sebesar 92,15% melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 115,18%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari Sebagian besar belanja akun pada Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Perindustrian untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri.

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	75%	93,97%	80%	92,15%	85%	90%

*Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Sasaran 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

Indikator dari sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20 Sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	76%	100%	131,57%

Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:

$$Er = \frac{SRe}{Ts} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi

SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya

Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan

Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat. Terdapat 2 (dua) peraturan yang diterapkan adalah

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Peraturan ini disahkan pada tanggal 8 Februari 2021, dimana peraturan ini telah digunakan sebagai pedoman dalam penilaian SAKIP di lingkungan Kementerian. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Peraturan ini telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan/kebijakan yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian serta sebagai pedoman bagi APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan dan konsultasi. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.

Dari kedua regulasi tersebut, seluruhnya efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal. Sehingga realisasi indikator ini sebesar 100% selama tahun 2022. Capaian dari realisasi ini adalah 131,57%.

Sasaran 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Indikator dari sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 21 sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.4	77.8	99,23%

Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2021 ini pelaksanaan evaluasi SAKIP pada unit-unit di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan dengan berdasarkan pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 93 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015. Evaluasi SAKIP merupakan evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi:

- a. Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%;
- b. Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25%;
- c. Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%;
- d. Evaluasi kinerja dengan bobot penilaian sebesar 10%;
- e. Pencapaian kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%.

Berikut ini adalah tabel hasil penilaian SAKIP Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian:

Tabel 22 sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai	Kategori
1	Ditjen Industri Agro	24,60	23,10	12,00	20,50	80,20	A
2	BSKJI	23,70	23,10	12,00	20,50	79,30	BB
3	Sekretariat Jenderal	22,20	24,60	10,95	20,50	78,25	BB
4	Ditjen IKMA	21,30	23,70	11,85	21,00	77,85	BB
5	Inspektorat Jenderal	22,50	23,10	11,70	20,50	77,80	BB
6	Ditjen KPAIL	23,10	23,10	11,10	20,50	77,80	BB
7	BPSDMI	22,20	22,80	11,85	19,25	76,10	BB
8	Ditjen IKFT	22,20	23,70	10,95	19,25	76,10	BB
9	Ditjen ILMATE	23,10	24,60	9,75	18,00	75,45	BB

Sumber: Data dari koordinasi penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal pada penilaian SAKIP yang dilaksanakan di tahun 2022 sebesar 77,80 kurang dari target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Capaian dari Indikator ini sebesar 99,23%.

Tabel 23 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78	80,1	78,4	77,8	78,6	78,8

*Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Sekretariat Inspektorat Jenderal akan terus berusaha menyelenggarakan SAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terkini, sehingga dihasilkan akuntabilitas kinerja yang terus lebih baik.

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

Sasaran 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

Indikator dari sasaran terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif, dan efisien dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 24 Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	72%	91,4%	126,94%
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	92%	91,52%	99,48%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	75	87,12	116,16%

a. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu:

1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor;

2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk;
3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran.

Beberapa point pertanyaan yang dilakukan melalui survei terkait kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan, yaitu tentang:

1. Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran;
2. Kejelasan informasi tentang persyaratan untuk pengajuan revisi anggaran;
3. Kecepatan pencairan anggaran;
4. Kejelasan informasi terkait pencairan anggaran;
5. Kejelasan Informasi Kenaikan Pangkat;
6. Keterbukaan Informasi Diklat;
7. Kecepatan Penyampaian data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Ketersediaan Produk Hukum Pendukung Pengawasan;
9. Kelengkapan dan kelayakan Sarana Prasarana;
10. Ketersediaan Media Informasi.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan hasil pengolahan dari survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal:

Tabel 25 Hasil Pengolahan dari Survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	4,58	91,6	Sangat Penting	4,22	84,4	Puas
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	4,32	86,4	Sangat Penting	4,03	80,6	Puas
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	4,61	92,2	Sangat Penting	4,35	87	Puas
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	4,38	87,6	Sangat Penting	4,25	85	Puas
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	4,58	91,6	Sangat Penting	4,09	81,8	Puas
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	4,29	85,8	Sangat Penting	4,22	84,4	Puas
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	4,42	88,4	Sangat Penting	4,22	84,4	Puas
8	Keakuratan data TLHP	4,42	88,4	Sangat Penting	4,26	85,2	Puas
9	Kelayakan Sarana Prasarana	4,35	87	Sangat Penting	4,09	81,8	Puas
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	4,32	86,4	Sangat Penting	4,03	80,6	Puas
Rata-Rata		4,43	88,54	Sangat Penting	4,17	83,52	Puas

Sumber: Laporan Survei dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Semester II Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari survei yang dilaksanakan, rata-rata respon merasa puas terhadap kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai pendukung manajemen kegiatan pengawasan. Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik.

b. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen

Indikator kinerja ini dapat dilihat dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 di Kementerian Perindustrian yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian Unit Eselon I dilakukan sebatas pada komponen pengungkit. Penilaian komponen hasil dilaksanakan hanya pada Unit Pusat (Tingkat Kementerian).

Dalam rangka mewujudkan penguatan pengawasan telah dilakukan PMPZI ke beberapa satker. Sebanyak 31 (tiga puluh satu) satker di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Internal, diperoleh 26 (dua puluh enam) satker yang memenuhi syarat dan layak untuk diajukan menjadi unit kerja berpredikat WBK/WBBM Tahun 2022 oleh Kementerian PAN RB. Hasil yang diperoleh dari penilaian PMPZI, perlu didiskusikan kembali terkait mekanisme PMPZI termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang telah meraih predikat WBK/WBBM.

Hasil pencapaian Unit Eselon I hanya dinilai pada komponen pengungkit, dengan nilai rata-rata sebesar 33,49 dari bobot maksimal 36,30 atau sebesar 92,26%. Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal nilai akhir yang diperoleh adalah 33,22 dari bobot maksimal 36,30 (91,52%). Hasil PMPRB unit pusat dinilai dari komponen Pengungkit yang terdiri dari Pemenuhan, Hasil Antara dan *Reform*. Selain itu juga dinilai dari komponen Hasil yang terdiri dari Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan Kinerja Organisasi. Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil *self assessment* mencapai 91,52%. Untuk realisasi dari indikator ini sebesar 91,52% dengan capaian sebesar 99,48%. Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas;
2. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan namun belum dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan;
3. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima kepada petugas/pelaksana layanan;
4. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional;
5. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar.

Sehingga pada instrumen-instrumen tersebut tidak dapat memberikan kontribusi maksimal pada penilaian RB Inspektorat Jenderal.

c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Indikator Capaian Kinerja pada bagian keuangan adalah capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2022, Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA diperoleh dari penyesuaian 13 bobot indikator, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran;
2. Data Kontak;
3. Penyelesaian Tagihan;
4. Capaian Output;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Revisi DIPA;
7. Deviasi Halaman III DIPA;

8. LPJ Bendahara;
9. Perencanaan Kas;
10. Kesalahan SPM;
11. Retur SP2D;
12. Pagu Minus;
13. Dispensasi

Nilai yang diperoleh di Aplikasi OMSPAN tahun 2022 sebesar 87,12 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 116,16%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Sasaran 8: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

Indikator dari sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 26 Sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	80,28	109,97%
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	65%	78,95%	121,46%
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	76%	97,2%	127,89%

a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah

(sangat rendah). Rata-rata profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal tahun 2022 diperoleh dari jumlah nilai jumlah pegawai, yaitu:

$$\frac{401,38}{5} = 80,28$$

*)Hasil perhitungan diperoleh dari laporan hasil penilaian nilai profesionalitas ASN Tahun 2022

Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN sebesar 80,28 dengan capaian sebesar 109,97%. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa walaupun secara output pengukuran indeks profesionalitas ASN tercapai, tetapi secara kualitas nilai masih perlu ditingkatkan.

b. *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan

Indikator ini diperoleh dari pengukuran jumlah *Sharing Knowledge*/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Perhitungan realisasi diperoleh dari pelaksanaan PKS selama tahun 2022 sebanyak 15 PKS, yaitu:

1. Pelatihan penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
2. Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP;
3. Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 1 dan 2 Tahun 2022 dari BPKP;
4. Sosialisasi dan Bimtek Administrasi Layanan Kepegawaian;
5. Pelatihan Certified Internal Auditor (CIA) dari Institute of Internal Auditors (IIA);
6. Pelatihan dan Sertifikasi Big Data Analyst Batch 3 Tahun 2022 dari BPKP;
7. Professional Governance, Risk Management & Compliance (CPGRC);
8. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1, Batch 5 dari BPKP Tahun 2022;
9. Pelatihan Pengawasan P3DN;
10. Pelatihan Reviu Laporan Kinerja;
11. Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer;
12. Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern di lingkungan APIP;
14. Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja;

15. Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di lingkungan APIP.

Lima Belas PKS tersebut dibagi dengan jumlah diklat substansi yang telah dilaksanakan sebanyak 19 (Sembilan belas) diklat substansi yang telah diikuti oleh auditor dan dikali 100%. Diklat substansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
2. Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP;
3. Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 1 dan 2 Tahun 2022 dari BPKP;
4. Sosialisasi dan Bimtek Administrasi Layanan Kepegawaian;
5. Pelatihan Certified Internal Auditor (CIA) dari Institute of Internal Auditors (IIA);
6. Pelatihan dan Sertifikasi Big Data Analyst Batch 3 Tahun 2022 dari BPKP;
7. Professional Governance, Risk Management & Compliance (CPGRC);
8. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1, Batch 5 dari BPKP Tahun 2022;
9. Pelatihan Pengawasan P3DN;
10. Pelatihan Reviu Laporan Kinerja;
11. Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer;
12. Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern di lingkungan APIP;
14. Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja;
15. Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di lingkungan APIP;
16. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di lingkungan APIP;
17. Audit Investigatif di lingkungan APIP;
18. Pelatihan Probit Audit di Lingkungan APIP;
19. Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMP) Tahun 2022 dari BPKP.

Realisasi indikator ini sebesar 64% (15 PKS dibagi dengan 19 Diklat Substansi). Sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 121,46%. Data penyelenggaraan diklat dan PKS tahun 2022 diperoleh dari laporan hasil penyelenggaraan diklat dan PKS dari bagian kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah

peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP guna memaksimalkan kinerja dalam memenuhi tugas dan fungsi APIP.

c. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat

Indikator ini diperoleh dengan perhitungan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal. Diklat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Tabel Pelaksanaan diklat Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
1	Pelatihan Infografis Angkatan I Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	21 Februari - 10 Maret 2022		Jaenudin Sukrillah
2	E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Angkatan II Tahun 2022	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	7 Maret - 18 Maret 2022		Nirna Fitri Yunahar
3	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat Pengkajian Informasi Nasional (Puspin)	11 April - 14 April 2022	PNBP	Yazid Abdurrohman Aunillah
4	Pelatihan penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Pusdiklatwas BPKP	18 April - 22 April 2022	STAR BPKP	1. Hilma 2. Rachmat Muhbianto 3. Akhmad Faiq Nashrullah 4. Paramitha Susilo Budi Utari
5	Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP	Pusdiklatwas BPKP	9 Mei - 13 Mei 2022	STAR BPKP	1. Trinanti Sulamit 2. Dwi Harjanto 3. Tjahyono 4. Rizki Perdana 5. Atik Rindarsih 6. Glory Meynar H
6	Webinar: Akuntansi Forensik dan Audit Investigative untuk Mendeteksi Fraud	Ruang Seminar	9 Mei - 13 Mei 2022	PNBP	1. Jelita berlina 2. Oktaviyanto Jimat Wibowo

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
7	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 1 Tahun 2022 dari BPKP	Pusdiklatwas BPKP	16 Mei - 21 Mei 2022	STAR BPKP	1. Tjahyono 2. Wuryanto
8	Diklat Pembentukan Auditor Ahli dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh	Pusdiklatwas BPKP	17 Mei - 30 Mei 2022	PNBP	Sumaryono
9	Sosialisasi dan Bimtek Administrasi Layanan Kepegawaian	Biro OSDM	6 Juni - 8 Juni 2022	Biro OSDM	1. Ismiyati 2. Fitriah A. Somad 3. Aditya Ngesti Utomo
10	Pelatihan Certified Internal Auditor (CIA) dari Institute of Internal Auditors (IIA)	Institute of Internal Auditors (IIA)	6 Juni - 9 Juni 2022	PNBP	1. Giry Rachman 2. Riko Lesmana Oetarman 3. Ciendy Martha Gayatri
11	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 2 Tahun 2022 dari BPKP	Pusdiklatwas BPKP	7 Juni - 10 Juni 2022	STAR BPKP	1. Herry Rusli Kuncoro 2. Rayersad Saesar A.
12	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMP) Tahun 2022 dari BPKP	Pusdiklatwas BPKP	6 Juni - 10 Juni 2022	STAR BPKP	1. Afrizal Haris 2. Jelita Berlina 3. Indra Laksmana 4. Oktaviyanto Jimat W

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
13	Pelatihan dan Sertifikasi Big Data Analyst Batch 3 Tahun 2022 dari BPKP	Pusdiklatwas BPKP	6 Juni - 8 Juni 2022 (Pembelajaran luring) 14 Juni - 16 Juni 2022 (Pembelajaran daring) 24 Juni 2022 (Ujian Sertifikasi)	STAR BPKP	1. Zaky Al Afkar 2. Prasetyo Putra M
14	Professional Governance, Risk Management & Compliance (CPGRC)	Revolution Mind Indonesia	12 Juni 2022	PNBP	1. Indra Laksana
15	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1, Batch 5 dari BPKP Tahun 2022	Pusdiklatwas BPKP	7 Juli - 28 Juli 2022	STAR BPKP	1. Paramitha Susilo Budi U 2. Noer Kristia Lestari S
16	Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP	Pusdiklatwas BPKP	18 Juli - 22 Juli 2022	PNBP	1. Jaenudin Sukrillah
17	Pelatihan Certified of Government Chief Audit Executive (CGCAE)	Pusdiklatwas BPKP	Pelatihan Mandiri (22 Agustus - 2 September 2022) Pelatihan Tatap Muka (5 September - 8 September 2022) Uji Kompetensi Daring (21 September - 22 September 2022)	PNBP	1. Teguh Adhi Arianto
18	Pelatihan Pengawasan P3DN	Pusdiklatwas BPKP	25 Juli - 29 Juli 2022	PNBP	1. Tiurma Juliani Pardede 2. Yansen Aditya Sembiring

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
19	Pelatihan Reviu Laporan Kinerja	Pusdiklatwas BPKP	29 Agustus - 2 September 2022	PNBP	1. Kesumaning Hastuti 2. Haris Seprianto
20	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer	Pusdiklatwas BPKP	29 Agustus - 2 September 2022	PNBP	1. Ciendy Martha Gayatri 2. Rizki Perdana 3. Dinavita Rizkyanti 4. Arantxa Tiar 5. Galih Tri Purnomo 6. Pratiwi Widyastuti
21	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Pusdiklatwas BPKP	29 Agustus - 02 September 2022	PNBP	1. Mohammad Adhi Rachmaidi 2. Hary Apriyandi Mulia 3. Indra Irwan 4. Elizabeth Frycillya Aritonang 5. Noa Salfhali 6. Ayu Budiarti 7. Prasetyo Putra Mahardika 8. Alexander Hamonangan 9. Gun Gun Gumilar Nurul Zatnika
22	Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)	Pusdiklatwas BPKP	Pelatihan Mandiri (12 September - 23 September 2022) Pelatihan tatap muka (26 September-29 September 2022)	PNBP	1. Bayu Fajar Nugroho 2. Sri Hastuti Nawaningsih

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
			Uji Kompetensi (6 Okt - 7 Okt 2022)		
23	Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Pusdiklatwas BPKP	6 Oktober - 7 Oktober 2022	PNBP	Edwin Darmawan
24	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern di lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	12 September - 16 September 2022	PNBP	1. Zaky Al Afkar 2. Suwarta
25	Pelatihan Certified Government Accounting Expert (CGAE)	Pusdiklatwas BPKP	19 September - 22 September 2022	STAR BPKP	M Subuh Washardito
26	Pelatihan Audit Tingkat Dasar di lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	19 September - 24 September 2022	PNBP	Noer Dwi Rizkia Putri
27	Pelatihan Probitas Audit di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	26 September - 30 September 2022	PNBP	Edwin Darmawan
28	Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja	Pusdiklatwas BPKP	03 Oktober - 07 Oktober 2022	PNBP	Ratih Putri Antini
29	Audit Investigatif di lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	31 Oktober - 04 November 2022	PNBP	Edwin Darmawan

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
30	Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	21 November - 25 November 2022	PNBP	1. Zita Tessa Rahayani 2. Atik Rindarsih
31	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	23 November - 25 November 2022	PNBP	Teguh Adhi Arianto
32	Diklat Penjenjangan Auditor Utama	Pusdiklatwas BPKP	21 November - 25 November 2022	PNBP	Wawas Swathatafrijah
33	Pelatihan E-learning Diklat Penjenjangan Auditor Madya	Pusdiklatwas BPKP	9 November - 17 November 2022	PNBP	1. Alexander Hamonangan 2. Rizki Perdana 3. Hariaidi Amri 4. Giry Rachman
31	Capacity Building Tahun 2022	Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	15 Desember 2022	PNBP	Seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal

Sumber: Laporan penyelenggaraan diklat dan PKS bagian Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal

$$\frac{\sum \text{APIP yang mendapatkan diklat}}{\sum \text{Seluruh APIP}} = \frac{101}{104} \times 100\% = 97,11\%$$

Total pegawai Inspektorat Jenderal adalah 109 orang pegawai dikurangi dengan total pegawai yang sedang Tugas Belajar sebanyak 5 orang menjadi 104 pegawai. Realisasi dari Indikator keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat sebesar 97,11% dengan Capaian 127,77%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah pengadaan diklat yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam hal ini terkait kompetensi dan kapabilitas APIP selama tahun 2022 dapat berjalan dengan optimal

3.1.2 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output/outcome) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan output yang maksimum dengan menggunakan input yang optimal. Dalam melaksanakan program kegiatan dukungan pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2022, Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan sumber daya sebagai berikut:

A. Sumber Daya Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 sebesar Rp32.384.877.000,- telah mengalami 14 kali revisi selama tahun 2022 yang ditujukan untuk Automatic Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian 2023, Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan, Revisi DIPA dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai dan Penghematan Blokir AA Belanja pegawai Kementerian Perindustrian TA 2022, dan Revisi DIPA dalam rangka Revisi Informasi Kinerja sehingga pada akhir tahun 2022, anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp30.426.696.000,- atau berkurang sebesar Rp1.958.181.000,- (6,43%) dari pagu anggaran pada awal tahun anggaran. Dengan adanya revisi anggaran tersebut, mitra Direktorat Jenderal Anggaran serta Bappenas tetap mengharapkan Inspektorat Jenderal untuk dapat menjaga ketercapaian output yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 28 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2019	Rp35.531.010.000,-	Rp34.039.890.721,-	95,80
2	2020	Rp25.255.171.000,-	Rp24.355.105.188,-	96,44
3	2021	Rp27.066.374.000,-	Rp26.898.446.068,-	99,38
4	2022	Rp30.426.696.000,-	Rp30.115.263.662,-	98,98

Sumber: Data Pagu dan Realisasi anggaran dari Aplikasi SPAN dari tahun ke tahun

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada dokumen Rencana Strategis, serta realisasi fisik dari penyerapan anggaran 2022 (98,98%), maka rasio penggunaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 29 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	134,20	134,20% ≥ 100% (Efektif)	1.406.445.000	1.400.258.978	99,56	134,20% ≥ 99,56% (Efisien)
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	109,94	109,94% ≥ 100% (Efektif)	169.902.000	169.324.513	99,66	109,94% ≥ 99,66% (Efisien)
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	100	100% = 100% (Efektif)	225.836.000	224.710.420	99,50	100% ≥ 99,50% (Efisien)
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa	115,18	115,18% ≥ 100% (Efektif)	1.100.519.000	1.096.941.650	99,67	115,18% ≥ 99,67% (Efisien)
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	131,57	131,57% ≥ 100% (Efektif)	72.800.000	72.001.500	98,90	131,57% ≥ 98,90% (Efisien)
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	99,23	99,23% ≤ 100% (Tidak Efektif)	13.800.000	13.800.000	100	99,23 % ≤ 100% (Tidak Efisien)

No	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	114,19	114,19% ≥ 100% (Efektif)	26.911.025.000	26.617.385.565	98,91	114,91% ≥ 98,91% (Efisien)
8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	119,77	119,77% ≥ 100% (Efektif)	526.369.000	520.841.036	98,95	119,77% ≥ 98,95 (Efisien)

*Cara pengukuran efektivitas dan efisiensi indikator kinerja diperoleh dari materi diklat Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, BPKP

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sampai akhir tahun 2022 sebanyak 56 (lima puluh enam) orang yang terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) orang PNS dan 19 (sembilan belas) orang PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Angka ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri atas 32 (tiga puluh dua) orang PNS dan 17 (Tujuh belas) orang PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

3.1.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian Kinerja

Pada tahun 2022, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai 15 (lima belas) poin indikator kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- 1) Penerapan Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian;
- 2) Capaian IACM Inpektorat Jenderal;
- 3) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Dari 15 (lima belas) indikator kinerja, terdapat 4 (empat) indikator yang tidak tercapai, yaitu:

- 1) Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker;
- 2) Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian;
- 3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal; dan
- 4) Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain sasaran dan target manfaat/dampak dari

transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan namun belum dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan kemudian terkait seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional Beberapa kegiatan terpaksa hanya dapat dilakukan secara daring. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat tercapai dengan optimal.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2022 sebesar Rp. 32.643.630.000,-, namun anggaran tersebut mengalami perubahan/revisi 10 kali selama tahun 2022. Berikut ini adalah tabel revisi DIPA selama tahun 2022 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan:

Tabel 30 Revisi DIPA selama tahun 2022 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Tanggal Terbit
1	DIPA Awal	-	11 November 2021
2	DIPA Revisi-01	Revisi menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor B/97/SJ-IND/PR/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 Hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian 2023 dimana Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi blokir sebesar Rp 2.494.365.000,-	15 Desember 2021
3	DIPA Revisi-02	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan	14 Maret 2022
4	DIPA Revisi-03	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan	8 April 2022
5	DIPA Revisi-04	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan	27 Mei 2022
6	DIPA Revisi-05	Revisi menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor B/58/SJ-IND/PR/VI/2021 tanggal 8 Juni 2022 Hal Revisi DIPA Dalam Rangka Pemenuhan Automatic Adjustment Kementerian Perindustrian TA 2022 dimana Inspektorat Jenderal mendapatkan tambahan alokasi blokir sebesar Rp.1.168.411.000,- serta terdapat penambahan blokir mandiri dari Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp.1.518.770.000,- karena pengajuan Kementerian Perindustrian tidak mengakomodir nilai anggaran blokir Kementerian Keuangan.	16 Juni 2022
7	DIPA Revisi-06	Revisi menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor B/60/SJ-IND/PR/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 Hal Revisi DIPA Dalam Rangka Pemenuhan Tambahan Automatic Adjustment Kementerian Perindustrian TA 2022, dimana tambahan Inspektorat Jenderal	14 Juli 2022

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Tanggal Terbit
		menjadi Rp. 53.005.000,- dan selebihnya berdasarkan revisi sebelumnya dialihkan ke Unit Eselon I lainnya	
8	DIPA Revisi-07	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan	25 Juli 2022
9	DIPA Revisi-08	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan	16 Agustus 2022
10	DIPA Revisi-09	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan	9 September 2022
11	DIPA Revisi-10	Revisi menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor B/195/SJ-IND/PR/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Hal Revisi DIPA Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai dan Penghematan Blokir AA Belanja pegawai Kementerian Perindustrian TA 2022, dimana Inspektorat Jenderal mengalami Penurunan Anggaran sebesar Rp 1.379.803.000 bersumber dari Tunjangan Kinerja Pegawai	13 Oktober 2022
12	DIPA Revisi-11	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan	1 November 2022
13	DIPA Revisi-12	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan	24 November 2022
14	DIPA Revisi-13	Revisi Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 239/SJ-IND/XI/2022 tanggal 22 November 2022 Hal Revisi DIPA Dalam Rangka Realokasi Anggaran Blokir Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara TA 2022 dimana Inspektorat Jenderal mengalami penurunan anggaran sebesar Rp2.335.978.000,- bersumber dari alokasi blokir AA	30 November 2022

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Tanggal Terbit
15	DIPA Revisi-14	Revisi DIPA dalam rangka Revisi Informasi Kinerja	22 Desember 2022

Sumber: tim kerja Program dan Anggaran

Revisi DIPA tersebut dibiayai melalui kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal Pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.115.263.662 atau 98,98% dari total pagu Sekretariat Inspektorat Jenderal (Revisi DIPA ke-14). Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 31 Realisasi Keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp28.664.445.000	Rp28.363.720.303	98,95
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp820.930.000	Rp817.866.000	99,63
Layanan Manajemen SDM Internal	Rp762.285.000	Rp755.598.456	99,12
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp129.036.000	Rp128.153.203	99,32
Pengawasan dan Pengendalian Produk	Rp50.000.000	Rp49.925.700	98,85
TOTAL	Rp30.426.696.000	Rp30.115.263.662	98,98

Sumber: Realisasi keuangan diambil dari Aplikasi SPAN

Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal langsung dialokasikan dan dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja, sehingga seluruh anggaran terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32 Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
6036.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		50.000.000	49.925.700	99,85
6036.BIA.001	Layanan Pengawasan Produk	1 Produk	50.000.000	49.925.700	99,85
051	Pengawasan Produksi dan Distribusi Produk Indonesia		50.000.000	49.925.700	99,85
A	Pengawasan Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah		50.000.000	49.925.700	99,85
6036.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		28.664.445.000	28.363.720.303	98,95
6036.EBA.957	Layanan Hukum	2 Dokumen	76.400.000	75.601.500	98,95
051	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		76.400.000	75.601.500	98,95
A	Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum		72.800.000	72.001.500	98,90
C	Internalisasi Penerapan Kode Etik Auditor		3.600.000	3.600.000	100
6036.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	3 Laporan	149.840.000	146.840.757	98

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
051	Pelayanan Hubungan Masyarakat		149.840.000	146.840.757	98
A	Penerbitan Majalah Solusi		149.840.000	146.840.757	98
6036.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6 Dokumen	449.491.000	448.400.163	99,76
051	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		449.491.000	448.400.163	99,76
A	Pelaksanaan Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian		14.637.000	14.490.000	99
D	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)		9.000.000	8.700.000	96,67
E	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian		146.265.000	146.134.513	99,91
F	Penilaian P3DN Semester I dan Fasilitasi Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Siswas P3DN		194.130.000	194.065.700	99,97
G	Penilaian P3DN Semester II		85.459.000	85.009.950	99,47
6036.EBA.962	Layanan Umum	1 Laporan	4.261.273.000	4.195.335.436	98,45
051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		4.261.273.000	4.195.335.436	98,45
A	Kebutuhan umum di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal		3.113.988.000	3.050.332.118	97,96
B	Penataan Arsip dan Sistem Informasi		13.916.000	13.914.000	99,99
C	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan		1.133.369.000	1.131.089.318	99,80
6036.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan	23.727.441.000	23.497.542.447	99,03
001	Gaji dan Tunjangan		16.853.574.000	16.627.577.680	98,66
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		16.853.574.000	16.627.577.680	98,66
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		6.873.867.000	6.869.964.767	99,94
A	Honorarium Operasional		2.016.308.000	2.016.236.000	100
B	Persediaan dan Perlengkapan Kantor		299.100.000	298.984.275	99,96
C	Biaya Langganan dan Operasional Perkantoran		3.417.189.000	3.414.112.394	99,91
D	Koordinasi dan Layanan Pimpinan		296.336.000	295.924.135	99,86
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		844.943.000	844.707.963	99,97

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
6036.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		820.930.000	817.866.000	99,63
6036.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	820.930.000	817.866.000	99,63
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		820.930.000	817.866.000	99,63
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		820.930.000	817.866.000	99,63
6036.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	105 Pegawai	762.285.000	755.598.456	99,12
051	Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal		762.285.000	755.598.456	99,12
A	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal		10.500.000	10.467.000	99,69
B	Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		511.969.000	507.341.036	99,10
C	Pelatihan di Kantor Sendiri (In House Training)		14.400.000	13.500.000	93,75
D	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		28.800.000	28.800.000	100
E	Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		25.200.000		
I	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai Inspektorat Jenderal		3.600.000	3.600.000	100
J	Fasilitasi Bebas Masa Tugas menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		3.180.000	3.180.000	100
L	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Itjen		9.340.000	9.340.000	100
M	Forum Auditor dan Capacity Building		180.496.000	179.370.420	99,38
6036.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24 Dokumen	129.036.000	128.153.203	99,32
6036.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	14.400.000	14.400.000	100
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		14.400.000	14.400.000	100
B	Penyusunan dan Revisi RKAKL Inspektorat Jenderal		14.400.000	14.400.000	100
6036.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10 Dokumen	9.000.000	9.000.000	100
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		9.000.000	9.000.000	100
A	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal		9.000.000	9.000.000	100
6036.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	12 Bulan	27.600.000	27.550.000	99,82
051	Pengelolaan Keuangan		27.600.000	27.550.000	99,82

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
A	Pelayanan Perbendaharaan		27.600.000	27.550.000	99,82
6036.EBD.965	Layanan Audit Internal	1 Dokumen	78.036.000	77.203.20993	98,93
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		78.036.000	77.203.203	98,93
A	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		50.736.000	49.903.203	98,36
B	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		22.500.000	22.500.000	100
D	Koordinasi Penilaian SAKIP Unit Eselon I Kementerian Perindustrian		4.800.000	4.800.000	100
TOTAL			30.426.696.000	30.115.263.662	98,98

Sumber: Pagu dan realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI

3.3 Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemukan dan Langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan agar memaksimalkan kinerja indikator kedepannya adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Kendala dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Sekretariat inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Eksternal	1,3%	Tidak ditemukan kendala dalam penyelesaian indikator ini dikarenakan realisasi indikator ini telah mencapai target.	-
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	Tidak ditemukan kendala, proses pengaduan telah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dan telah ditangani serta ditindaklanjuti hingga selesai	Menata kembali teknis penanganan pengaduan masyarakat, membangun sistem SPAN lapor terintegrasi dengan <i>website</i> Inspektorat Jenderal
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan)	92%	1. Target masih terlalu tinggi, karena beberapa rekomendasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat (penyelesaiannya bisa lebih dari 1 bahkan 2 tahun anggaran. Ex: pengusulan CPNS, Satker beberapa kali telah mengusulkan namun belum disetujui untuk tahun berjalan, Penyusunan Kebijakan, MoU dengan Pihak Eksternal, dll);	1. Pengusulan penurunan target 2. Pengusulan penambahan anggaran 3. Mendorong Kepala Satuan Kerja agar menginstruksikan pegawai yang bersangkutan menyelesaikan tanggungjawabnya 4. Melakukan pemantauan secara rutin agar auditi terdorong untuk segera

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				<p>2. Anggaran yang tersedia untuk Pemantauan Tindak Lanjut tidak sebanding dengan jumlah obrik yang perlu dipantau</p> <p>3. Penanggungjawab kegiatan telah dimutasi ke tempat lain;</p> <p>4. Terhambat oleh pekerjaan utama auditi.</p>	menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal.
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	72%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai pada masing-masing indikator RB Area Penguatan Pengawasan, terutama terkait <i>Whistle Blowing System</i> dan Benturan Kepentingan.
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Strategi pencapaian kinerja masih belum relevan, pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan pengendalian internal yang efektif; • Pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					<p>maupun tujuan Kementerian;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan penyusunan peta risiko satker; • Pengawasan manajemen risiko satker
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Capaian IACM Inpektorat Jenderal *)IKU	Level 3	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Dilakukan evaluasi secara berkelanjutan pada tiap-tiap elemen
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	75%	Tidak ditemukan masalah yang perlu perhatian lebih	Diharapkan untuk kedepannya penggunaan produk dalam negeri dapat tercapai 100% dalam pengadaan barang dan jasa.
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	Kurangnya respon dari responden pada kuesioner dalam mengisi pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan.	Meminta pengisian kuesioner secara langsung melalui link yang sudah disiapkan.
6.	Tersusunnya Perencanaan Program,	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,2	Terdapat beberapa point pengukuran penilaian yang masih rendah nilainya	Perlu ditingkatkan kinerja masing-masing unit di lingkungan Inspektorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
	Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel				Jenderal agar lebih akuntabel dan profesional serta perlu adanya koordinasi internal dalam mewujudkan SAKIP yang lebih baik.
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Kinerja dukungan manajemen terhadap kegiatan pengawasan perlu dimaksimalkan terkait pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan kecepatan penyampaian data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%	Respon yang tidak cepat dalam hal pengumpulan data oleh seluruh bagian di Inspektorat Jenderal terkait penilaian RB	Meminta data secara langsung pada bagian terkait
		Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	74	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Diharapkan kedepannya Nilai IKPA inspektorat Jenderal dapat terus

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					melebihi dari target yang telah ditetapkan.
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Kedepannya agar Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas kinerja.
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	65%	Setelah pelaksanaan diklat, peserta tidak langsung melaksanakan PKS dikarenakan jadwal yang bentrok dengan tugas lainnya	Selanjutnya akan dibuatkan Surat Pernyataan dan Penjadwalan bagi Pegawai yang akan dikirim mengikuti Diklat agar setelah diklat melaksanakan <i>Sharing Knowledge</i> /PKS.
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	76%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Diharapkan kedepannya agar lebih banyak APIP yang mengikuti diklat kompetensi dengan tujuan agar kapabilitas dan produktivitas dapat meningkat.

Sumber: Data dari berbagai sumber

BAB IV. PENUTUP

A. Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2022, secara umum dapat dikemukakan:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2022 telah berjalan dengan cukup baik, hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat tercapai;
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Pelaksanaan Penilaian PMPRB tahun 2022 di lingkungan Kementerian Perindustrian, dapat disimpulkan Berdasarkan hasil akhir PMPRB maka diperoleh Indeks RB Kementerian Perindustrian Tahun 2022 *unevaluated* sebesar **85,60** dengan kategori **A** atau predikat **Sangat Baik**. Interpretasi atas hasil penilaian mandiri tersebut menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian telah memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja;
4. Berdasarkan laporan hasil evaluasi terhadap Penilaian Mandiri penyelenggaraan Kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah berada pada Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3,00. Pada level ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance* dan *Consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan efektivitas, efisiensi dan ekonomis (3E), peringatan dini, peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan Tata Kelola;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2022 telah menerbitkan Majalah Solusi per semester, sebagai wahana komunikasi dan

informasi bagi auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor.

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2022 adalah situasi dan kondisi yang masih menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat di masa pandemi. Sehingga masih ada jadwal dan rencana kegiatan yang harus diubah dan pelaksanaannya sebagian besar dilakukan melalui daring.

Kemudian, pemanfaatan sistem informasi pengawasan yang masih belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Dengan memanfaatkan sistem informasi, diharapkan kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, namun demikian anggaran Inspektorat Jenderal belum mencukupi untuk mewujudkan sistem informasi yang handal.

C. Upaya Dan Strategi Pemecahan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah:

1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi terkait kebijakan pemerintah dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator utama kinerja Inspektorat Jenderal;
2. Telah diusulkan penambahan anggaran untuk mewujudkan sistem informasi pengawasan ke Sekretariat Jenderal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2022 ini disusun dimana menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.